

DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Muh. Kadarisman¹, Izzatusholekha², Nadia Putra³

- ¹) Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
²) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
³) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

*muh.kadarisman@umj.ac.id

Abstrak

Birokrasi di Indonesia menghadapi krisis kepercayaan masyarakat, maka kecaman dan pesimisme muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan berbagai pola tingkah laku dalam birokrasi yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat (organizational slack), ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanannya. Penyebabnya antara lain orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan sempit, penguasaan terhadap administrative engineering kurang memadai, dan bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan kualitas SDM, peralatan dan penganggaran yang cukup dan handal (viable bureaucratic infrastructure). Tujuan penelitian: menganalisis dinamika politik dalam reformasi administrasi publik. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: politik Negara terkait dengan kebijakan pemerintah, tidak terlepas dari peran pemerintah untuk rakyatnya. Pemerintah harus mengawal dan melaksanakan idiologi Negara untuk mewujudkan welfare state. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena tidak sejalan dengan paradigma dan reformasi administrasi publik. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan dalam peningkatan profesionalisme Aparatur, sehingga tugas birokrasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Politik, Reformasi, Administrasi.

PENDAHULUAN

Berdasarkan studi awal di lapang penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut, bahwa pada era reformasi Administrasi Publik saat ini, tantangan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan layanan publik yang unggul menjadi andalannya. Pelayanan publik, merupakan miniatur pemerintah, sekaligus merupakan cerminan kinerja pemerintahan yang lebih luas.

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas tinggi, dapat membantu dalam membangun citra pemerintah menuju good governance. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan tidak lain adalah untuk melayani publik dan menjaga suatu sistem ketertiban, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara baik dan wajar. Berdasarkan perspektif Administrasi Publik, pada hakikatnya, pemerintahan adalah pelayanan

kepada masyarakat, Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, dalam pemerintahan modern, pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikannya menjadi semakin baik (*the closer the government, the better it services*) (Haning, 2018a).

Ditegaskan bahwa paradigma kebijakan pelayanan publik di era reformasi Administrasi Publik, seharusnya memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma *rule government* ke paradigma *good governance*. Dengan demikian, selaku regulator pemerintah harus mengubah pola pikir dan cara kerjanya agar disesuaikan dengan tujuan reformasi Administrasi Publik, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat demi kepuasan masyarakat tersebut. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Namun kondisi ideal tersebut hingga sekarang belum mampu diwujudkan secara optimal dan merata di tanah air Indonesia (Horhoruw, M., Karippacheril, T. G., Sutyono, W., & Thomas, 2012).

Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, pemerintah selama satu dekade terakhir melakukan reformasi Administrasi Publik. Reformasi ini di era global telah menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perubahan

dinamika kehidupan sosial politik yang dinamis, sekaligus untuk mengatasi berbagai agenda persoalan bangsa lainnya seperti parahnya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas performa pelayanan publik, dan inkompetensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik. Evaluasi terhadap reformasi birokrasi dapat dikatakan berhasil, jika pemerintah mampu mengatasi ketiga masalah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi Administrasi Publik tersebut, ternyata berbagai agenda yang menjadi persoalan publik tidak juga berhasil terpecahkan. Masalah KKN di era reformasi ini justru terasa makin menguat, begitu pula tingkat kepuasan masyarakat atas performa pelayanan publik juga masih cenderung rendah. Sementara itu, praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi pandemik Covid-19 saat ini juga cenderung rendah, sehingga pemerintah dinilai inkompeten dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi publik (Firnansyah, 2011).

Dinamika Politik

Terkait bahasan dinamika politik, terlebih dahulu Wildan Zulkarnain (2016) mengemukakan tentang pengertian “dinamika”, adalah suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang. Bahkan juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai lingkungan sekitarnya. Secara umum, dinamika adalah perubahan baik berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya. Dengan demikian Kadarisman (2021) menegaskan bahwa dalam artikel ini dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara

anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lain secara keseluruhan. Ada pun politik erat kaitannya dengan power (politisasi birokrasi). Politik merupakan sarana untuk memaksakan kehendak pihak tertentu kepada pihak lain dengan cara tertentu (Firnas, 2011)

(Dwiyanto, 2017) menegaskan bahwa “Dinamika Politik” adalah gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika politik memberi pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal. Sensitifitas terhadap informalitas masyarakat merupakan cara dalam memahami dinamika politik.

Hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah money politic (politik uang) yang semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik. Jadi, dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjangingan aspirasi dan sejenisnya.

Dengan adanya dinamika politik, maka terjadi pergeseran dalam politik antara lembaga- lembaga atau badan pemerintahan, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan pendapat di atas, Kadarisman (2021) menegaskan bahwa dinamika politik dalam artikel ini adalah pergerakan politik dalam

pemerintahan yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik, sehingga gagasan politik yang dijalankan oleh Negara tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan rakyat, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak.

Reformasi Administrasi Publik

Kadarisman (2021) menegaskan bahwa dalam setiap perubahan yang terjadi, hal ini tidak selalu menjanjikan keberhasilan, namun tidak ada suatu keberhasilan pun yang tidak diawali dengan perubahan. Begitu pula terkait reformasi, dikemukakan bahwa reformasi di sini adalah perubahan secara drastis dalam hal perbaikan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat maupun negara. Sedangkan “Reformasi Administrasi Publik”, di sini menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menuntut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah. Secara sederhana, Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik (Keban & Yermias, 2008).

Dalam Reformasi Administrasi Publik tersebut, terdapat usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi baik aspek reorganisasi kelembagaan, sikap, maupun perilaku birokrat, juga efektivitas organisasi dari aspek program yang meningkat, sehingga dapat diciptakan kepemimpinan dan administrasi publik yang sehat dan

terciptanya tujuan pembangunan nasional (Kadarisman, 2021). Ada pun secara teoretis, lahirnya fenomena tersebut diakibatkan oleh pergeseran perkembangan ilmu Administrasi Publik yang beralih dari pendekatan Normative Science ke pendekatan Behavioral Ecologys.

Secara empiris dikemukakan bahwa gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pandemik Covid-19, telah memaksa banyak pihak terutama birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan, serta mencari alternatif mengenai sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan zaman. *There is not the best, but the better*, meski bukan yang terbaik, tetapi lebih baik dari sebelumnya (Iriawan, 2017).

Kadarisman (2021) menegaskan, bahwa “Reformasi Administrasi Publik” dalam artikel ini merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap, dan perilaku birokrat), efektivitas organisasi meningkat (aspek program), sehingga dapat diciptakan kepemimpinan dan administrasi publik yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Pemikiran demikian, tentu terkait dengan konsep organisasi publik. Organisasi di sini adalah sebagai pembinaan hubungan wewenang, dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi secara struktural, baik secara vertikal maupun horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Organisasi publik adalah sebagai wadah aktivitas sistem sosial yang tersusun dari sejumlah subsistem, semua itu saling tergantung dan saling berhubungan sehingga membangun Public Management

Reform. Dengan demikian, public sector di Indonesia penting dilakukan reformasi total, yaitu penghematan tenaga kerja dan biaya dalam organisasi dengan maksud meningkatkan kinerja. Reformasi administrasi publik, bukan lagi ditujukan bagi perbaikan kerja organisasi pemerintahan (*machinery of government*) berdasarkan pendekatan manajemen ilmiah. Reformasi administrasi publik tidak lagi didefinisikan sebagai perubahan internal organisasi pemerintah, tetapi lebih sebagai alat atau program yang berhubungan dengan pemerintah, sektor publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dan partisipasi masyarakat (Prasojo, 2004).

METODE

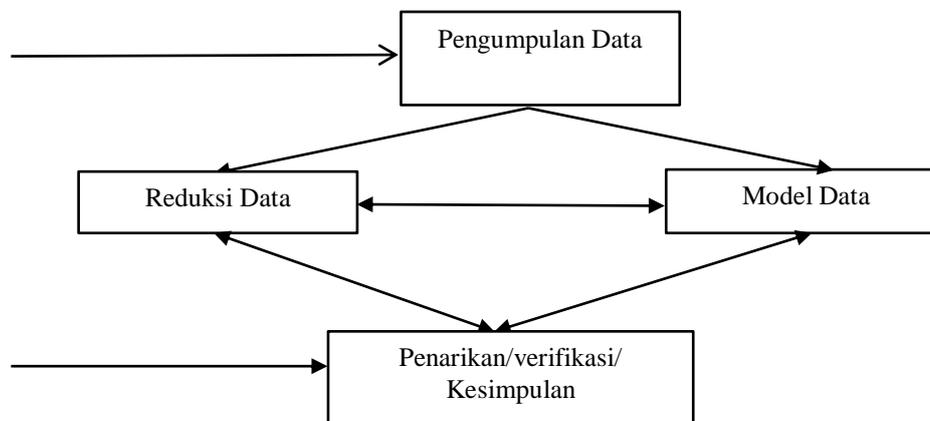
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menafsirkan phenomena yang terjadi, menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya terkait judul penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik Purposive, yaitu informan yang dijadikan sumber informasi merupakan orang yang sengaja dipilih sesuai kriteria penelitian (Desk Study) (Kadarisman, 2010).

Instrumen pengumpulan data terkait sumber data primer menggunakan observasi berpartisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan *focus group discussion* (FGD) serta uji data kualitatif dengan

triangulasi. Untuk data sekunder menggunakan dokumentasi berupa buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan terkait objek penelitian (data display) (Miles B. & Michael, 1994).

(Gambar 1).



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Cresswel, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik

Pergerakan politik dalam pemerintahan

Dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) para Informan sebagai decision makers yang didukung hasil library research menunjukkan bahwa pergerakan politik di sini merupakan pergerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Sunarto (2004:195) menegaskan bahwa yang dimaksud gerakan sosial politik adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau memertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Sedangkan ciri-ciri dari gerakan sosial politik adalah sebagai berikut: a. adanya perilaku kolektif; b. adanya kepentingan bersama; c. mengubah serta mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya; d. tujuan jangka panjang; e. tujuan di luar institusi seperti demo dan pawai. Gerakan politik

tersebut, dapat terjadi di sekitar satu atau lebih dari rangkaian isu permasalahan atau keprihatinan bersama dari kelompok sosial. Hal ini tentu berbeda dengan partai politik, gerakan politik tersebut tidak terorganisasi dan tidak pula memiliki keanggotaan (Yudiatmaja, 2015).

Di samping itu, gerakan politik juga bukan gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah, tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan atau fokus penyebab dari gerakan tersebut. Keterangan tersebut didukung hasil observasi di lapang penelitian (field research), bahwa dalam pergerakan politik tersebut terkait dengan sistem politik, yaitu sebuah proses pengambilan kebijakan

publik yang dilakukan oleh pemerintah. Aspek yang terdapat dalam sistem politik merupakan sebuah perjuangan kelompok tertentu di dalam negara untuk memperoleh posisi di pemerintahan dengan melalui sebuah proses pemilihan umum. Dalam sistem politik di sebuah negara, komponen-komponen yang diatur meliputi: rakyat dalam negara tersebut, orang-orang yang menduduki posisi di pemerintahan, proses pemilihan pejabat pemerintahan, struktur pemerintahan, kebijakan publik, pusat kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan kepada daerah (Gibson, 2013).

Dalam gerakan politik tersebut, adalah dengan melibatkan massa atau kelompok masyarakat yang sebetulnya merupakan gejala psikologis massa dalam komunikasi yang sporadis seperti dalam teori Stimulus-Respons (S-R). Hal ini dikarenakan adanya rangsangan (stimuli), dan pesan yang telah tersampaikan atau diterima oleh sekelompok orang, karena adanya respons atau tanggapan. Antara individu dan masyarakat terjadi kontak stimulus yang sangat kuat dan kompleks, proses pemberian rangsangan akan menyebabkan terjadinya penyebaran keyakinan individu menjadi keyakinan publik dengan melalui berbagai media perantara, yang menjadikan publik sebagai suatu medan proses-proses S-R tersebut. Dalam kaitan ini, dikemukakan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan para expert bahwa dalam pendekatan S-R tersebut, kemampuan mengidentifikasi bentuk perilaku masyarakat menjadi sesuatu yang penting. B.F. Skinner (1948) menjelaskan, bahwa manusia terbatas dalam berhubungan dengan lingkungan dan sesamanya melalui kesatuan dalam menangkap setiap stimuli yang sifatnya memberi data untuk menjelaskan suatu perilaku manusia.

Dari hasil proses triangulasi menunjukkan, bahwa adanya S-R tersebut adalah tidak sebatas apa yang ditangkap melainkan jauh lebih mendalam dan komprehensif yaitu melibatkan kemampuan kognitif (pemikiran, thought) yang akan membawa pada adanya suatu objek perangsang sampai pada proses meresapi (to feel) dan memahami (verstehen, understanding), sehingga mematangkan sekelompok massa pada keyakinan bahwa sesuatu yang diterima melalui proses kognitif tersebut adalah baik dan benar. Setiap bentuk perilaku yang muncul bukanlah hasil ramalan (guess), melainkan hasil pemikiran yang komprehensif. Oleh sebab itu, apabila kemudian hasil pemikiran itu akan melahirkan aksi sosial atau tindakan sosial, adalah berdasarkan keyakinan yang telah terbentuk sebagai keyakinan politiknya.

Hal yang perlu dielaborasi, bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi menjadikan partisipasi rakyat mendapatkan ruang yang besar dalam perannya sebagai warga negara. Ini memiliki dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Partai politik menjadi wadah organisasi yang di dalamnya terdapat bermacam bentuk aktifitas-aktifitas, yang mencerminkan peran masyarakat sebagai warga negara. Begitu pula, konsekuensi dari peran serta masyarakat dalam membangun Negara, adalah adanya amanat dari rakyat sebagai wujud dari bangsa yang dicita-citakan, yakni terjaminnya hak asasi manusia yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani yakni ide, tujuan, dan cita-cita yang menjadi dasar

pondasi bagi tegaknya solidaritas kelompok. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu memberikan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus digunakan untuk memerjuangkan pemberdayaan rakyat (society empowerment) agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat (Hikmah, 2017).

Politik Negara Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi (field research) didukung hasil library research menjelaskan bahwa politik Negara adalah merupakan kebijakan pemerintah, dan tentu tidak terlepas dari apa sebenarnya peran pemerintah yang diamanatkan Negara untuk rakyatnya. Pemerintah di sini adalah instrumen Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi Negara. Oleh karena itu, pemerintah dinamakan juga sebagai penyelenggara Negara yang memainkan politik Negara, dan harus mengawal dan melaksanakan idiologi Negara. Idiologi negara Indonesia adalah tentu mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada intinya dapat dirumuskan yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut, kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

(Brudeseth, 2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, a. kesejahteraan materi; b. kesejahteraan bermasyarakat; c. kesejahteraan emosi; dan d. keamanan. Jadi, kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Sedangkan kesejahteraan masyarakat/ sosial adalah sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.

Penjelasan di atas didukung hasil wawancara mendalam dengan para Informan bahwa tugas utama pemerintah sebagai penyelenggara negara, setidaknya ada tiga hal yaitu: pertama, sebagai administrator pemerintahan; ke dua, sebagai administrator pembangunan dan ke tiga, sebagai administrator kemasyarakatan. Diharapkan dengan tugas utama tersebut, maka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimaksud diselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang baik, politik pemerintahan yang pro rakyat, pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dan melibatkan/ memberdayakan seluruh masyarakat (society empowerment), dilaksanakan dengan tertib, prosedural, jujur, adil, efektif, dan efisien. Hasil FGD menegaskan

bahwa agar penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil optimal, maka terdapat sembilan asas yang perlu dijadikan rujukan. Pertama, kepastian hukum; ke dua, tertib penyelenggaraan negara; ke tiga, kepentingan umum; ke empat, keterbukaan; ke lima, proporsionalitas; ke enam, profesionalitas; ke tujuh, akuntabilitas; efisiensi; dan ke sembilan efektifitas.

Ada pun dari proses triangulasi dapat diinformasikan bahwa berbagai kebijakan dan program yang diuraikan di atas, adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di antaranya adalah membangun sistem politik yang demokratis serta memertahankan persatuan dan kesatuan. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu memertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan netralitas birokrasi serta makin memererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Yudiatmaja, 2015).

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

Reformasi Administrasi Publik

Usaha Mengubah Struktur dan Prosedur Birokrasi

Hasil indepth interview didukung hasil library research menunjukkan bahwa dengan munculnya paradigma organisasi era pasca 1980 yang lebih dikenal dengan *colaborative individual*, di antaranya mengisyaratkan agar organisasi melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain atau hubungan antara pegawai/ individu dengan organisasi didasarkan pada kontrak, sama sekali tidak direspon oleh organisasi publik di Indonesia. Penerimaan pegawai di organisasi publik (organisasi pemerintah) mulai awal masa pemerintahan orde baru hingga berakhirnya masa pemerintah tersebut masih menggunakan standar *seumur hidup* (*long life*). Bahkan demi kepentingan politik tertentu penerimaan pegawai tidak memperhatikan *work force* dan *work load*-nya. Belum ada penambahan struktur dan fungsi yang dijalankan, tetapi pegawai tetap ditambah, sehingga tidaklah mengherankan kalau pada masa otonomi daerah banyak pegawai yang resah karena tidak mendapatkan tempat, meskipun mereka tetap menerima gaji walaupun jauh dari kemampuan dan profesionalismenya. Ketidak seimbangan antara *work force* dan *work load* menjadikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kelabakan, karena harus bertindak efisien akibat keterbatasan dana (Wibawa, 2014).

Penjelasan tersebut didukung gasil FGD dari para expert bahwa struktur dan prosedur birokrasi atau dikenal sebagai kelembagaan birokrasi Indonesia begitu

kompleks, sehingga perlu disederhanakan dan ditingkatkan profesionalismenya. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pada tahun 2019 adalah 4.189.121 orang (BKN, 2019). Sebanyak 22,77% bertugas di Pemerintah Pusat dan 77,23% bertugas di Pemerintah Daerah. Jumlah aparatur yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berurut-turut sebanyak 38,46%, dan 50,40%. Secara rinci, jumlah ASN pada instansi pusat dan daerah dilihat dari jabatannya, bahwa ASN pusat dan daerah yang menduduki jabatan struktural adalah sejumlah 466.717, terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, Pengawas dan Eselon V. Dengan demikian, apabila akan dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon, maka diperlukan penyederhanaan terhadap 446.747 jabatan struktural Administrator, Pengawas dan Eselon V (Bhakti & Sefitara, 2015).

Di samping itu, ditunjukkan bahwa jumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU) lebih Banyak dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), yang didominasi oleh JFT Guru sebesar 69,94%, sehingga JFT lain selain guru dan medis jumlahnya lebih kecil. Hal ini menegaskan bahwa JFT kurang berkembang. Tidak berkembangnya JFT juga dapat dilihat dari proporsinya terhadap jumlah pegawai. Pada tahun 2011 jumlah JFT sebanyak 1.994.559 (42,92% dari jumlah 4.646.351 total ASN), dan tahun 2019 meningkat menjadi 2.111.346 (50,40% dari jumlah 4.189.121 total ASN), berarti terjadi peningkatan sebesar 5,86%. Sementara itu pada tahun 2011 jabatan struktural sebanyak 229.141 (4,93% dari jumlah 4.646.351 total ASN) pada tahun 2019 meningkat menjadi 466.717 (11,14% dari jumlah 4.189.121 total ASN), berarti terjadi peningkatan sebesar 103,68%.

Peningkatan yang sangat signifikan pada jabatan struktural dan kurang berkembangnya JFT, yang ditemukan oleh Bappenas sejak tahun 2011-2012, menunjukkan gejala proliferasi organisasi dan mengukuhkan Parkinson's Law tentang birokrasi. Padahal untuk mempercepat terwujudnya organisasi birokrasi yang "miskin struktur, kaya fungsi" hasil evaluasi kebijakan Reformasi Birokrasi, dengan "memerbanyak jabatan fungsional" (Bappenas, 2013).

Kurang berkembangnya JFT mengindikasikan bahwa kebijakan dan arah reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, untuk menciptakan birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, efisien, dan efektif, lebih banyak diisi jabatan-jabatan fungsional yang mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya, secara empiris tidak terwujud.

Akhir-akhir ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, ASN dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, efektif dan efisien (narendra, 2017).

Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efektif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui observasi di lapang penelitian (field research) dapat dikemukakan bahwa strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu: a. penerapan birokrasi digital; b. standarisasi pelayanan; dan c. profesionalisme SDM aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19 dan varian lainnya. Selain untuk memberikan informasi update tentang penanganan Covid-19, birokrasi digital juga dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, birokrasi digital sangat memiliki peran penting di setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi Covid-19 dan varian lainnya. Hal ini dikarenakan dampak dari birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat, kecepatan pelayanan tersebut menjadi hal yang amat dinantikan publik. Standarisasi pelayanan menjadi hal terpenting, sehingga birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Ibrahim, 2008).

Para pakar administrasi publik atau pakar birokrasi dan ahli-ahli lain, tidak pernah luput menyarankan agar birokrasi di Indonesia segera melakukan pembaharuan, kalau tidak ingin larut dalam arus globalisasi. Namun apa yang disarankan hanya sebatas diterima, belum direalisasikan, sehingga patologi birokrasi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat justru oleh penguasa dan kroni-kroninya dihidupsuburkan, karena memang

menguntungkan mereka. Setelah bangsa Indonesia dilanda krisis dan paradigma baru otonomi daerah sebagai salah satu alternatif, mau tidak mau birokrasi harus direformasi. Bahkan pakar birokrasi (Toha, 2017) sebelum Indonesia dilanda krisis, sudah menyarankan agar birokrasi di Indonesia segera direvitalisasi. Ada tiga alternatif dalam merevitalisasi birokrasi, ke tiga hal tersebut adalah kepemimpinan yang tersentralisasi. Berikut masalah kualitas pelayanan pemerintah kepada publik akan meningkat seiring iklim kompetitif yang telah bergulir. Rentang kendali (span of control) yang lebih dekat akan memudahkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik.

Hal senada dikemukakan hasil proses triangulasi, bahwa penyederhanaan birokrasi dengan mengubah struktur organisasi (restrukturisasi organisasi publik) tersebut, diharapkan dapat membuat sistem birokrasi berdasarkan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Semakin cepat, masukan dan laporan dari masyarakat, itu akan lebih baik dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di samping itu, penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, karena organisasi pemerintah yang ramping (flat organization), dan bukan organisasi yang gemuk dan kinerjanya bertele-tele/lambat. Dalam flat organization tersebut, sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berjenjang panjang dengan cara disposisi-disposisi, namun kebijakan dapat diputuskan dengan cepat dan tepat, dalam rangka memberikan pelayanan yang responsif sekaligus memuaskan masyarakat.

Dengan agenda penyederhanaan struktur birokrasi tersebut, Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern yang

mengedepankan kecepatan bekerja, mengutamakan kualitas tinggi, dan menciptakan kepuasan masyarakat.

Menggunakan gagasan paradigma yang dilakukan oleh para ahli administrasi publik, (Ugyel, 2014) mengklasifikasikan administrasi publik yang ideal ke dalam empat tipe: patronasi, administrasi publik tradisional, New Public Management (NPM), serta model baru yang sedang berkembang. Karakter yang birokratis merupakan ciri dari administrasi publik tradisional, sedangkan untuk model mutakhir, lebih menekankan pada collaborative governance. Hal yang penting untuk dielaborasi lebih lanjut, dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi Covid-19 saat ini Indonesia telah siap dalam mengatasinya, karena memiliki birokrasi yang kuat namun tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menciptakan birokrasi modern yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam birokrasi modern tersebut, dikembangkan satu prinsip yang fundamental yaitu doing the right thing right, first time and every time (melakukan sesuatu yang benar secara benar, segera dan setiap waktu).

Tentu saja perubahan dalam layanan publik tersebut tidak bisa berhenti dalam slogan semata, namun harus berupa tindakan nyata. Dalam flat organization tersebut, pentingnya penerapan ISO 9000 di antaranya adalah organisasi akan efektif jika mampu memanfaatkan teknologi informasi elektronika secara terintegrasi. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan reorientasi pada seluruh staf, penguasaan personal terhadap instrumen tersebut dan memanfaatkan instrumen tersebut secara optimal.

Kepemimpinan Nasional dan Administrasi Publik Yang Sehat

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan para Informan sebagai decision maker dan didukung hasil library research menegaskan bahwa pencapaian reformasi Administrasi Publik, tentu sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional adalah dilihat dalam konteks pimpinan di lembaga tinggi negara baik itu lembaga tinggi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kepemimpinan nasional tersebut harus mencirikan sebagai seorang pemimpin perubahan. Seorang pemimpin perubahan harus memiliki pola pikir yang benar, bukan melanggengkan keamanan atau kekuasaan. Pemimpin tersebut harus meyakini bahwa tugas dasarnya ialah bagaimana melakukan perbaikan secara terus menerus (Dwiyanto, 2017), artinya kepemimpinan nasional yang berciri sebagai pemimpin perubahan dalam upaya mereformasi administrasi publik yang berjalan haruslah memiliki dua modal dasar yaitu komitmen dan kapasitas. Dua modal dasar ini merupakan hal penting dalam memformulasikan atau merevisi ulang kebijakan yang sudah ada kenapa belum berjalan dengan optimal.

Penjelasan di atas didukung hasil FGD dari para expert dan hasil library research yang mengemukakan bahwa paling tidak pemimpin nasional diharapkan memiliki kemampuan dalam menetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai terkait pelaksanaan reformasi administrasi. Kemajuan reformasi administrasi, sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat strategis dalam mewujudkan pencapaian reformasi administrasi dalam menciptakan sistem yang baik lewat

kebijakan publik yang unggul. Upaya reformasi administrasi, sejatinya memang membutuhkan political commitment and political will dari seluruh elite pemerintahan, tanpa kehadiran itu maka menjadi mustahil untuk berhasil (Dwiyanto, 2015). Selain itu, dukungan politis dan konsistensi (usaha jangka panjang) pada tataran elite dalam menciptakan mendorong reformasi administrasi juga menjadi faktor penting tercapainya tujuan reformasi administrasi (Sedarmayanti & Safer, 2016).

Ada pun hasil observasi melalui field research dan library research menjelaskan, bahwa Administrasi Publik di sini lebih dikenal dengan istilah Administrasi Negara. Administrasi Publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Waluyo, (2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Dengan demikian, administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Administrasi Publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan, meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik oleh para birokrat (Waluyo, 2017).

Di samping itu, berikut dikemukakan hasil proses uji data kualitatif dengan

triangulasi bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis, adalah dengan cara memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui proses reformasi Administrasi Publik, sehingga lebih mencerminkan tindakan profesionalisme yang tinggi. Ada pun tujuan reformasi Administrasi Publik atau reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain, adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan Administrasi Publik yang sehat yaitu birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Reformasi Administrasi Publik/ birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah, meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja aparatur. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah (Haning, 2018b).

Hal yang perlu dielaborasi lebih dalam bahwa kegiatan penyusunan SOP AP di lingkup pemerintahan adalah sesuai format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Agar pengimpelentasian SOP AP dapat berjalan dengan baik diperlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur. Hal ini dilandasi dengan alasan, bahwa pegawailah yang paling memahami kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing, dan yang

akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Terciptanya Tujuan Pembangunan Nasional

Dari hasil observasi di lapang penelitian dan didukung hasil library research menunjukkan bahwa pembangunan nasional di sini merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Siagian (2012) menegaskan bahwa pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut, karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah tercapai secara absolut. Sedangkan dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa tujuan pembangunan yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di samping itu juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keterangan di atas dipertajam oleh hasil FGD, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terjadi keterlibatan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana,

menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Ada pun visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito & Nugroho, 2001). Sedangkan tujuan pembangunan tersebut, adalah untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut untuk dijaga agar terjadi keharmonisan di antara ke dua sumber dayanya.

Dari hasil wawancara mendalam dengan para Informan bahwa dengan perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, tidak melulu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, dengan adanya globalisasi di Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tentunya didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). Ada pun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti: a. membangun sistem politik yang demokratis. Sistem politik

yang pernah berkembang di Indonesia sangat beragam. Sistem politik yang pernah berkembang ini memiliki tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Penjelasan di atas, selanjutnya dipertegas lagi dengan hasil triangulasi bahwa berjalannya sistem politik di Indonesia ini tidak hanya terjadi untuk tatanan pemerintahan saja, namun untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. b. mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa. c. percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hal yang perlu dielaborasi lebih dalam, bahwa pemerintah Indonesia kini semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Seperti

melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti Papua. d. membangun kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. e. mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Di seluruh dunia, muncul suara yang menuntut kepemimpinan mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Untuk mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk memulai agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Agenda 2030 terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) atau tujuan global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Konsep SDGs lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012. Tujuannya adalah untuk membuat rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan:

lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan global menggantikan tujuan pembangunan milenium (MDGs), yang pada September 2000 mengajak dunia untuk menghentikan rasa malu akibat kemiskinan melalui agenda 15 tahun yang serupa. MDGs menetapkan target yang bisa diukur dan disetujui secara universal untuk memusnahkan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, mencegah penyakit mematikan yang sebenarnya bisa disembuhkan, dan memperluas kesempatan bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan, serta beberapa tujuan pembangunan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, menjadikan partisipasi rakyat mendapatkan ruang yang besar dalam perannya sebagai warga negara. Hal ini berdasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa, yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Politik Negara, merupakan kebijakan pemerintah, dan tentu tidak terlepas dari apa sebenarnya peran pemerintah yang diamanatkan Negara untuk rakyatnya. Oleh karena itu,

pemerintah sebagai penyelenggara Negara memainkan politik Negara, yang harus mengawal dan melaksanakan ideologi Negara untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas Aparatur. Melalui restrukturisasi, sebagai bagian dari reformasi yang komprehensif terhadap birokrasi Indonesia, maka harapan agar tugas birokrasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan. Hal yang penting dari reformasi administrasi publik adalah perubahan kualitatif baik vertikal maupun horisontal yang terintegrasi dengan berbagai faktor politik dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, D., & Sefitara, U. (2015). *Reformasi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*. Biro Organisasi.
- Brudeseth, J. (2015). *Microfinance and Life Satisfaction in Ecuador A study about financial determinants of life satisfaction among micro entrepreneurs in the informal economy*.
- Dwidjowito, & Nugroho, R. (2001). *Reiventing Pembangunan Jakarta*. Alex Kompotindo.
- Dwiyanto, A. (2017). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firnas, M. A. (2011). EVALUASI REFORMASI BIROKRASI. *Civil Service Journal*, 5(2 November). <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/108>
- Gibson. (2013). *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Erlangga.

- Haning, M. T. (2018a). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.31947/JAKPP.V4I1.5902>
- Haning, M. T. (2018b). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.31947/JAKPP.V4I1.5902>
- Horhoruw, M., Karippacheril, T. G., Sutiyono, W., & Thomas, T. (2012). *Transforming the Public Sector in Indonesia Delivering total reformasi*. World Bank Report.
- Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. In *Social Science Computer Review*. CV Mandar Maju. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/61999>
- Keban, & Yeremias, T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Miles B., M., & Michael, A. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=miles+and+huberman+qualitative+data+analysis+&ots=kFTE0HVUYQ&sig=_DRsMGhyjTSOSDIGF83-GdjyKFc&redir_esc=y#v=onepage&q=miles+and+huberman+qualitative+data+analysis&f=false
- narendra, rosa arista. (2017). EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI LEGALITAS PEMBANGUNAN DEMOKRASI. *JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 3(1). <https://doi.org/10.52447/POLINTER.V3I1.798>
- Prasojo, E. (2004). People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik*, 4(2), 10–24. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34690050/PerspektifMembangunPartisipasi-Publik-eko_prasojo-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1627056920&Signature=CZhqMFqcUJ8pEtFmoAq12yHfsMLhCKINxDA6aIpjo5VtFpbw629piDBP~k4badn9Y9hhfdplXwBiQrohMER70DfxFTmXFVOAci1otxcykU
- Sedarmayanti, S., & Safer, G. Y. (2016). PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DI GUGUS SATU DESA NEGLAWANGI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(3), 501–524.

<https://doi.org/10.31113/JIA.V13I3.100>

Ugyel, L. (2014). EXPLAINING HYBRIDITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN EMPIRICAL CASE OF BHUTAN'S CIVIL SERVICE. *Public Administration and Development*, 34(2), 109–122. <https://doi.org/10.1002/PAD.1685>

Waluyo, S. (2017). INDONESIA'S PRECIPITANT OF COUNTERTERRORISM POLICY IN THE ERA OF DEMOCRATIC TRANSITION. *UNISCI Discussion Papers*. <http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf>.

Yudiatmaja, W. E. (2015). Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(1), 10–28. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/662>